



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA SUSANTO
2. Jabatan : ANGGOTA I BPK RI
3. NHK : 107077

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.057.210.000

1. Tanah Seluas 896 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 8.960.000
2. Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 6.850.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/277 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.041.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 336.911.060

1. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 148.200.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS GX AT TM2FX (4X2) A/T / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 188.711.060

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 434.212.560

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.777.329.818

F. HARTA LAINNYA Rp. 176.518.800

Sub Total Rp. 8.782.182.238

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.782.182.238

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.